



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT MRT JAKARTA
UNIT KERJA : DIVISI RAILWAY MAINTENANCE

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISMANSYAH
2. Jabatan : KEPALA DEPARTEMEN INFRASTRUCTURE & FACILITY MAINTENANCE
3. NHK : 231120

II. DATA HARTA

| | | |
|---|------------|----------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 1.000.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/54 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 178.500.000 |
| 1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000 | | |
| 2. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000 | | |
| 3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 28.000.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 76.740.658 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | 7.000.000 |
| Sub Total | Rp. | 1.290.240.658 |
| III. HUTANG | Rp. | 193.342.800 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 1.096.897.858 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **12 November 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.